



## RAPBD DKI 2015 Disahkan Februari

**SATU** persatu tahapan proses pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015 dilalui. Setelah kelar menuntaskan pembahasan KUA-PPAS, kemarin (12/1) pihak eksekutif dan legislatif menggelar rapat paripurna penyampaian RAPBD 2015.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI optimis pengesahan RAPBD dilakukan pertengahan Februari 2015.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Märsudi mengatakan pihaknya telah menentukan jadwal pembahasan RAPBD DKI 2015 yang mulai digelar kemarin (12/1), dengan rapat paripurna perdana hi Februari dengan menggelar rapat paripurna terakhir untuk pengesahan DKI 2015 ■

"Pokoknya Februari sudah tuntas semuanya. Kita sudah jadwalkan pada 16 Februari mendatang, RAPBD DKI 2015 disahkan," terangnya, kemarin (12/1).

Dipaparkannya juga, rapat paripurna akan digelar sebanyak empat kali. Yakni, rapat paripurna perdana, kemarin (12/1) dengan agenda penyampaian pidato Gubernur DKI mengenai RAPBD DKI 2015.

Kedua, rapat paripurna pada Rabu (14/1) dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD DKI. Ketiga, rapat paripurna ketiga yang akan digelar Jumat (16/1) dengan agenda penyampaian jawaban gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi.

Lalu rapat paripurna terakhir yang akan digelar Senin (16/2) dengan agenda pengesahan RAPBD DKI 2015 menjadi Perda DKI 2015. "Antara rapat paripurna ketiga dan keempat memang rentang waktunya agak panjang. Karena setelah rapat paripurna ketiga, kami akan kontinyu membahas APBD di komisi, Badan Anggaran (Banggar) dan fraksi," papar juga politisi PDIP itu.

Pembahasan RAPBD DKI 2015

di tingkat komisi, lanjutnya, mulai efektif dilakukan pada 19-22 Januari. Lalu dilanjutkan dengan pembahasan di tingkat internal Banggar pada 23 Januari. Lalu rapat Banggar dengan Tim Penyusunan Anggaran Daerah (TPAD) DKI pada 26-27 Januari mendatang.

Setelah itu, akan digelar rapat gabungan Pimpinan DPRD DKI pada 28 Januari. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan RAPBD DKI 2015 ditingkat fraksi-fraksi pada 29 Januari. Hasil pembahasan anggaran di tingkat fraksi akan dibawa dalam rapat gabungan pimpinan DPRD kedua yang digelar 30 Januari nanti.

"Lalu mulai 3-13 Februari, TPAD bersama BPKD melakukan penyusunan kode rekening kegiatan dalam RAPBD DKI 2015. Setelah itu selesai, baru APBD DKI dapat kita sahkan pada 16 Februari," ungkapnya juga. Pras-sapaan Prasetio, juga mengaku optimis, APBD DKI akan dapat disahkan sesuai jadwal yang ditentukan.

Sehingga tidak akan mendapatkan sanksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena terlambat mengesahkan APBD DKI 2015. Sebab, APBD akan disahkan sebelum tenggat waktu diberikan. Diungkapkannya juga, Pemprov dan DPRD DKI telah sepakat besaran APBD DKI 2015 sekitar Rp 73 triliun.

Jumlah itu turun dibandingkan yang diajukan sebelumnya oleh eksekutif mencapai Rp 77 triliun. Penurunan ini dikarenakan sisa lebih penggunaan anggaran 2014 yang awalnya Rp 18 triliun setelah dikurangi menjadi Rp 8 triliun. Selain itu, penurunan juga terjadi karena dana penyertaan modal pemerintah (PMP) menjadi Rp 6,6 triliun dari yang direncanakan Rp 11,3 triliun.

Alokasi anggaran Rp 6,6 triliun, hanya diberikan kepada

dua BUMD DKI. Yaitu, PT MRT Jakarta dan PT Transjakarta. "Dua BUMD tersebut layak diberikan PMP. Mereka kan akan membangun MRT dan membeli bus untuk rakyat. Yang enam BUMD lainnya nanti saja-lah," paparnya juga.

Sekedar diketahui, setelah *memorandum of understanding* (MoU) mengenai Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon APBD Sementara (KUA-PPAS) 2015 dengan nilai Rp 73 triliun ditandatangani eksekutif dan legislatif pada Kamis (8/1), DPRD DKI mulai menyusun jadwal rapat paripurna untuk membahas Raperda APBD DKI 2015.

Pras juga mengatakan rapat paripurna perdana yang digelar kemarin (12/1) tentang pidato Gubernur DKI Jakarta mengenai penyampaian RAPBD DKI 2015. Sedangkan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan fokus anggaran RAPBD DKI 2015 adalah bidang pekerjaan umum (PU) dan pemberian penyertaan modal pemerintah (PMP). "Lebih banyak anggaran untuk PU dan PMP," ujarnya. (pes)